

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pendidikan di Indonesia terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring perkembangan jaman dan teknologi saat ini. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dengan berbagai terobosan yang salah satunya adalah kurikulum. Sehingga dengan kehadiran pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk memberikan lingkungan pembelajaran yang nyaman agar peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik guna mengembangkan potensi yang dimiliki, serta mendapatkan wawasan dan kemampuan berpikir (Afandi dan Sajidan, 2017).

Kualitas lembaga pendidikan menjadi standarisasi dalam melahirkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Tidak terlepas dari pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dimana lulusannya yang harus memiliki kualifikasi serta keterampilan dibidang keahlian yang dipilihnya. Sebagai lembaga yang berbasis vokasi, kehadiran SMK memiliki peranan penting dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil sesuai bidang keahliannya dengan permintaan pasar yang terus mengalami perubahan dan perkembangan ke arah yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah pada pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa SMK diprioritaskan agar lulusannya siap dalam upaya mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja atau

lapangan kerja dan dapat melaksanakan pengembangan profesionalitas dalam menjalankan aktivitas kerja. Hal yang sama ditegaskan juga dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 Tahun 2003 pasal 15 menjelaskan bahwa lembaga SMK didefinisikan sebagai suatu lembaga pendidikan menengah yang tujuannya ialah menyiapkan peserta didik yang dibekali dengan keahlian pada bidang kerja tertentu.

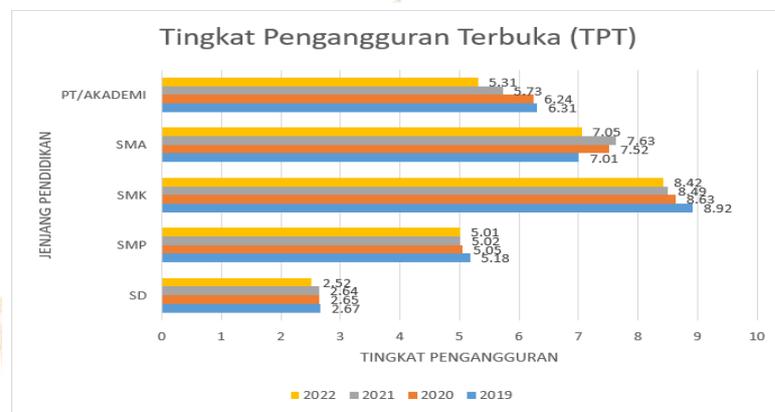
Kualitas lulusan SMK diharapkan mampu beradaptasi dengan kemajuan dan perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri yang bermutu. Oleh sebab itu, konsep dan kurikulum pembelajaran yang berlangsung di sekolah, baik bersifat praktik dan teori diharapkan mampu memiliki keterkaitan dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, Dunia Kerja (DUDIKA) sehingga siap untuk diterapkan (aplikatif) di lapangan (Jatmoko, 2013).

Kenyataan dalam pelaksanaan pembelajaran di SMK Negeri di Kabupaten Bangli sebagai sekolah vokasi yang lebih banyak pada kegiatan pembelajaran praktikum namun dalam kegiatan pembelajaran belum melibatkan pengajar dari dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Selain itu dalam penilaian belum melibatkan DUDIKA dengan kondisi tidak diketahui dengan jelas apakah hasil penilaian tersebut telah sesuai dan sinkron dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri maupun dunia kerja, sehingga dengan jelas dinyatakan belum terjadi *link and match* dalam pelaksanaan pembelajaran yang berbasis DUDIKA.

Menyiapkan lulusan sebagai tenaga terampil menengah (*middle skilled worker*) sesuai konsep pendidikan vokasi harus didukung oleh berlangsungnya proses pendidikan di sekolah yang mampu mengarahkan dan mengembangkan pada keterampilan peserta didik yang memiliki keunggulan dan kompetensi keahlian pada bidangnya. Terkait hal ini, kurikulum yang ada di SMK harus sesuai dengan jenis kompetensi keahlian yang dibutuhkan oleh pasar, sehingga lulusan memiliki kesiapan memasuki dunia kerja melalui bekal keterampilan yang dimiliki. Selain itu juga, diarahkan pula *output* lulusan SMK harus bekerja, melanjutkan dan berwirausaha (BMW) [Direktorat SMK]. ‘Bekerja’ yang dimaksudkan di sini yaitu mampu mengambil peluang kerja sesuai dengan bidang keahliannya, sedangkan ‘Melanjutkan’ merujuk kepada kemampuan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dengan melanjutkan ke perguruan tinggi. Sementara itu, ‘Wirausaha’ lebih merujuk kepada kemampuan membuka lapangan kerja sendiri (Indriaturrahmi & Sudiyanto, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, peserta didik harus memiliki kesiapan dan kompetensi untuk memasuki dunia kerja ialah dengan dibekali kompetensi yang didasarkan pada kebutuhan DUDIKA melalui sinkronisasi kurikulum berbasis *link and match*. Dengan demikian, sekolah diharuskan memiliki keterkaitan yang kuat dalam melaksanakan perencanaan kurikulum, evaluasi pembelajaran, sarana prasarana yang mendukung, dan juga proses pembelajaran berbasis industri di sekolah. Pada akhirnya, kompetensi keahlian yang dimiliki peserta didik, memang berdasarkan pada kebutuhan dan ketentuan yang sesuai dengan DUDIKA.

Merujuk kepada target mutu lulusan SMK saat ini tentunya terdapat kesenjangan atau (*gap*) terhadap kualitas dan mutu SMK dimana kurangnya keterserapan di Dunia kerja dan Industri dimana kurang terserapnya dengan baik hingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data tingkat pengangguran lulusan SMK pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022)

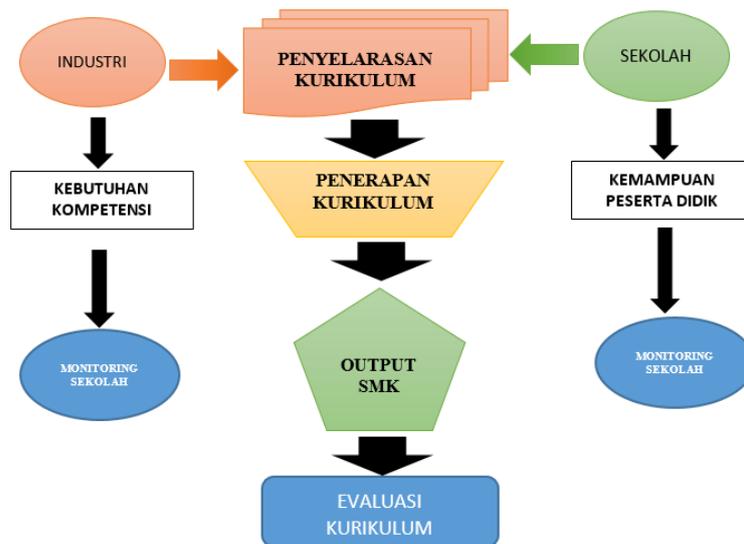
Berdasarkan data pada gambar 1.1 tingkatan dari pendidikan yang berlangsung pada bulan Februari 2022, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap jenjang SMK masih yang paling tinggi dibandingkan pada tingkatan pendidikan yang lainnya, yakni senilai 8,42 persen. Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa tingkatan dari pengangguran terbuka (TPT) pada bulan Februari tahun 2019 pada angka 8,92 terjadi penurunan. Walaupun begitu, jika dilihat dari tingkatan lainnya, lulusan SMK masih berada pada posisi tertinggi.

Fenomena tersebut di atas menunjukkan bahwa SMK belum memenuhi harapan DUDIKA secara sepenuhnya. Tidak tercangkupnya lulusan SMK ini tidak semata-mata disebabkan oleh tidak tersedianya lapangan kerja, namun disebabkan oleh beberapa indikasi yaitu belum semua SMK memiliki kualitas yang sama dalam menghasilkan lulusan yang dibekali dengan kompetensi keahlian sesuai bidangnya serta pengetahuan yang baik (Direktorat Pembinaan SMK, 2019), selain itu kompetensi dari lulusan yang masih rendah, karena dalam proses pembelajaran belum dibekali secara optimal dengan kompetensi yang diharapkan (Perdana, 2019). Menurut Husein (2019) dengan kompetensi lulusan SMK yang masih rendah, banyak lowongan pekerjaan yang tidak terisi karena calon pekerja (lulusan) belum memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan oleh DUDIKA. Hal ini berdampak pada besarnya tingkatan pengangguran lulusan SMK yang masih menunjukkan bahwa kualitas dari pendidikan SMK masih belum optimal (Husein, 2019). Faktor lain adanya kesenjangan ini didorong oleh beberapa permasalahan yaitu fasilitas sekolah yang kurang memadai, sehingga peserta didik belum mampu mengembangkan keterampilannya secara optimal, dan masih terjadinya ketidakcocokan antara yang sedang dipelajari di sekolah dengan praktiknya di DUDIKA (Rahdiyanta, 2019).

Dengan memperhatikan perkembangan kompetensi SMK yang masih rendah ini, bahwa sekarang tenaga kerja atau SDM masih belum mampu menaikkan mutu lulusan yang berdaya saing tinggi (Setiyo, 2018). Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran yang terjadi di sekolah belum sesuai dengan kebutuhan DUDIKA saat ini yang mengakibatkan *output* lulusan SMK tidak siap untuk memasuki dunia

kerja (Perdana, 2018). Dengan demikian dibutuhkan peningkatan revitalisasi, kualitas dan juga relevansi dari pendidikan SMK dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bermutu. Lebih lanjut Suastra (2021) mengungkapkan bahwa pendidikan yang bermutu salah satunya didukung oleh penerapan proses pembelajaran yang berkualitas. Permasalahan ini menyebabkan, kebutuhan akan tenaga kerja terampil, kreatif serta inovatif belum mampu terpenuhi secara optimal dalam merespon perkembangan kebutuhan pasar (Ditjen Pendidikan Vokasi, 2020).

Kondisi ini sebenarnya telah direspons oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Pembaharuan SMK dalam upaya menghasilkan SDM yang memiliki daya saing melalui program revitalisasi. Salah satu revitalisasi yang dilakukan adalah menyesuaikan kurikulum dan bermitra baik dengan DUDIKA guna melaksanakan pengembangan pendidikan SMK yang sejalan dengan kompetensi yang diperlukan oleh lulusan yang dihasilkan. Supaya kurikulum yang diterapkan oleh SMK sejalan dan selaras dengan yang dibutuhkan oleh pihak DUDIKA, dengan demikian diperlukan alur guna menyelaraskan kurikulum yang ada. Skema penyelarasan kurikulum sekolah dengan DUDIKA ditampilkan pada gambar 1.2.



Gambar 1.2
 Penyelarasan Kurikulum
 (Sumber: Kemdikbud, 2017)

Penyelarasan kurikulum dengan DUDIKA dimaksudkan untuk mencetak lulusan yang bermutu yang mampu melaksanakan pemenuhan terhadap persyaratan dan kualifikasi yang diperlukan oleh DUDIKA. Yang mana SMK memiliki perbedaan dengan sekolah umum, terutama pada kompetensi keahlian yang harus dimiliki oleh lulusan berkaitan secara langsung dengan DUDIKA, hal ini yang menyebabkan kurikulum SMK tidak bisa dipisahkan dari kondisi dan perkembangan DUDIKA (Sunarto & Supriadi, 2019). Kegiatan ini diperlukan kemitraan yang dijalin antara SMK dengan DUDIKA karena memiliki kepentingan pada relevansi pendidikan dengan DUDIKA agar dapat menghasilkan lulusan yang unggul sesuai dengan kebutuhan industri. Kemitraan ini membantu sekolah dalam proses merancang pola pembelajaran mengacu pada kebutuhan pasar akan tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga peserta didik mampu dibekali dengan

keterampilan *hard skill* dan juga *soft skill* yang bagus, dapat menaikkan proses dari mutu pembelajaran, terlebih untuk bidang praktik.

Kemitraan yang dijalin antara SMK dengan DUDIKA merupakan kunci pokok keberhasilan pendidikan sistem ganda (PSG) pada SMK, dimana proses pelaksanaannya dirancang serta dilakukan evaluasi secara bersama, sehingga pada akhirnya kesesuaian kompetensi lulusan terhadap tuntutan DUDIKA meningkat (Wayong, 2010). Lebih lanjut, Sajidan et al. (2018) menyampaikan bahwa kemitraan ini memiliki peranan yang strategis dalam menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dalam persaingan global dan juga produktif. Tahapannya dalam melaksanakan penilaian pembelajaran, penyesuaian kurikulum dan proses yang ada di SMK bisa dilaksanakan dengan cara pementapan dan penyempurnaan model yang menyesuaikan dengan permintaan yang ada (*demand-driven*), merubah model dari yang memberikan penawaran (*supply-driven*) yang terjadi sekarang dengan standarisasi. Karakteristik dari SMK ialah memprioritaskan pendekatan pembelajaran yang berbasis dengan pekerjaan (*job-based learning*).

Kemitraan antara SMK dengan DUDIKA terus mendapat dukungan dari pemerintah, salah satunya adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *Link and Match* dengan Industri. Peraturan ini menjadi pedoman bagi DUDIKA dalam memfasilitasi pembinaan kepada SMK dalam menghasilkan lulusan sebagai tenaga kerja yang berkompeten, yang mana peranannya adalah memberikan masukan guna sinkronisasi kurikulum, memberikan ruang untuk peserta didik dan guru praktik atau magang di DUDIKA

sesuai dengan program keahlian, memberikan instruktur sebagai pembimbing praktik guru dan peserta didik, memberikan bantuan alat praktik serta mengeluarkan sertifikat bagi guru dan peserta didik.

Sinergi yang dibangun antara SMK dan DUDIKA sangat diperlukan terlebih dalam upaya menyesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan industri sehingga terciptanya lingkungan yang kolaboratif dalam menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan (Dirjen Pendidikan Vokasi, 2020). Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) bahwa beberapa SMK telah melakukan kemitraan dengan DUDIKA melalui berbagai program seperti ditampilkan pada gambar 1.3



Gambar 1.3
Data Rekap Kemitraan SMK dan DUDIKA
(Sumber: Dirjen Pendidikan Vokasi, 2020)

Temuan lainnya yang didapatkan dari studi pendahuluan bahwa kemitraan antara SMK Negeri di Kabupaten Bangli dengan DUDIKA telah dilaksanakan. Kemitraan yang terjalin bukan hanya sebatas hitam di atas putih saja, namun memiliki kesamaan dalam kesepahaman, tujuan yang sama, dan saling membahu dalam menyusun program-program kemitraan, sehingga sekolah dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan dapat terserap di berbagai bidang industri sesuai dengan kompetensi keahliannya. Dalam bermitra, tentunya

didukung dengan adanya kemampuan kepala sekolah dan tim dalam menjaga dan memelihara hubungan yang baik dengan DUDIKA serta berorientasi pada pemberian kepercayaan satu sama lain, yang pada akhirnya akan terbentuk kemitraan yang berkelanjutan dan memberikan keuntungan bagi sekolah dan DUDIKA.

Kemitraan dengan DUDIKA memberikan manfaat yang penting bagi sekolah, salah satunya adalah dapat memberikan kekuatan bagi pendidikan di SMK dalam menjalankan proses pembelajaran yang berorientasi pada praktik atau sesuai dengan apa yang terjadi di industri. Artinya adanya kesesuaian antara apa yang dipelajari di sekolah dengan yang diharapkan oleh DUDIKA. Hal ini dilakukan melalui rancangan kurikulum bersama. Dalam konteks yang berkenaan dengan memberi bekal pada lulusan ialah mempersiapkan peserta didik agar masuk pada bursa ketenagakerjaan, yakni berbagai indikator dari kompetensi yang wajib mendapatkan perhatian dari pihak kepala sekolah, diantaranya ialah: 1) melek terhadap era digitalisasi (*digital age literacy*), 2) hubungan komunikasi yang efektif (*effective communication*), 3) memiliki kemampuan untuk berpikir yang sifatnya inventif (*inventive thinking*), dan 4) produktivitas yang baik (*high productivity*) (Afandi dan Sajidan, 2017).

Selain revitalisasi SMK sebagai upaya peningkatan kualitas SDM yang unggul, pemerintah juga diharapkan mendukung program yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan yaitu konsep kebijakan merdeka belajar yang befokus pada peningkatan penciptaan SDM yang berkualitas dan kompetitif. Sasaran merdeka belajar adalah sekolah, kepala sekolah, guru dan peserta didik yang menjadi satu

ekosistem utuh dalam membuat program yang inovatif di sekolah (Arbaa, 2020). Kebijakan ini sebagai bentuk pemenuhan aspek dan akses pendidikan di SMK yang berupa kompetensi keahlian kepala sekolah dan pendidik yang profesional yaitu guru sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing, dengan adanya keleluasaan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik melalui proses pembelajaran yang dirancang bersama (Priatmoko & Dzakiyyah, 2020).

Segala bentuk pembelajaran yang dirancang oleh guru tentunya harus mendapat arahan dan bimbingan dari seorang pemimpin sehingga guru mampu bergerak dan berbuat sejalan dengan kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah. Namun tidak menutup kemungkinan, Rendahnya kemampuan guru dikontribusi oleh kepemimpinan kepala sekolah yang belum optimal dalam melahirkan pemberdayaan seluruh pemangku kepentingan di sekolah, terutama dalam memberdayakan guru-guru yang dibimbingnya (Agung et al., 2014).

Menyikapi kebijakan merdeka belajar, tidak dapat dipungkiri bahwa peran kepala sekolah sangat penting, terutama mengenai konsep kemandirian sekolah karena memiliki tugas sebagai pemimpin sekaligus *manager*. Kepala sekolah dituntut memiliki pengetahuan dan pemahaman yang amat baik mengenai poin penting dari kebijakan merdeka belajar karena berkaitan erat dengan keputusan yang akan diambil oleh kepala sekolah sebagai seorang *leader* dalam mewujudkan kebijakan merdeka belajar di sekolah. Selanjutnya, sebagai seorang pengelola, kepala sekolah harus mampu mengelola dan mendayagunakan segala sumber daya sekolah untuk melaksanakan pembinaan kepada guru dalam mendukung merealisasikan kebijakan tersebut (Khurniawan & Erda, 2019).

Kebijakan merdeka belajar memberikan kesempatan dan peluang bagi sekolah guna mengoptimalkan potensi peserta didik, serta dibutuhkan komitmen yang kuat dari kepala sekolah, guru, peserta didik, komite sekolah, DUDIKA dalam mengoptimalkan segala bentuk kegiatan belajar di sekolah yang sesuai dengan konsep kebijakan merdeka belajar. Kebijakan ini, memberikan peluang pada kepala sekolah dalam memikirkan bagaimana proses pendidikan yang baik, menarik, merumuskan solusi terbaik guna menyelesaikan permasalahan yang muncul terutama mengenai kesenjangan antara SMK dengan DUDIKA, serta mempersiapkan lulusan yang sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan klasifikasi DUDIKA baik dari segi *attitude*, wawasan, kompetensi keahlian yang mampu menjadi pendorong bagi pengembangan mutu SMK melalui pembelajaran yang menyenangkan, mandiri yang berpusat pada kompetensi peserta didik. Tetapi, yang terjadi di lapangan masih terdapat beberapa kepala sekolah yang belum siap (Hendri, 2020). Hal ini senada berdasarkan temuan yang diperoleh melalui hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui proses wawancara dengan beberapa kepala sekolah dan guru di SMK Negeri Kabupaten Bangli bahwa saat ini, belum semua SMK yang menerapkan kebijakan merdeka belajar secara optimal karena belum adanya sosialisasi secara betul mengenai kebijakan ini, sehingga berdampak pada pemahaman kepala sekolah dan guru yang kurang. Di sisi lain, masih ada sebagian kepala sekolah SMK yang belum mempunyai strategi tepat dalam menetapkan inovasi yang baru sebagai pemecahan masalah yang berkenaan dengan lulusan yang dihasilkan oleh SMK yang dapat menjalani persaingan pada

pasar kerja. Kepala sekolah seharusnya memiliki kemampuan dalam mengelola dan memimpin kegiatan di sekolah.

Kepala sekolah dituntut agar menyiapkan lulusan SMK yang siap memasuki dunia kerja serta mempunyai keterampilan dibidangnya melalui program kemitraan yang dirancang dan melibatkan industri untuk memperhatikan tuntutan kebutuhan dunia kerja (*demand driven*). Seperti yang termaktub pada Pasal ayat 1 PP 28 Tahun 1990 bahwa menyebutkan bahwa pihak kepala sekolah memiliki tanggung jawab guna menyelenggarakan pemeliharaan dan pendayagunaan prasarana ataupun sarana, pembinaan tenaga kependidikan administrasi sekolah, dan juga kegiatan pendidikan.

Murwantini (2017) dan Khurniawan (2019) mengemukakan kepala sekolah perlu memiliki kemampuan dalam mengenali elemen perubahan dengan sikap terbuka, mengembangkan pengetahuan serta keahlian yang dimiliki untuk dapat mengelola perubahan yang terjadi khususnya kebutuhan akan tenaga kerja, sehingga membawa sekolah untuk ke arah yang lebih baik.

Kepemimpinan kepala sekolah sangat berperan dalam menetapkan kualifikasi kerja sesuai standar DUDIKA. Hal ini akan terwujud apabila peran kepala sekolah dalam proses pendidikan di SMK mempunyai kemitraan yang bagus terhadap pihak DUDIKA. Selanjutnya Murwantini (2017) menyampaikan bahwa kepala sekolah SMK harus memiliki peran sebagai 1) pemberi keyakinan kepada anggota untuk siap menghadapi perubahan DUDIKA yang dinamis dan kebijakan pendidikan, 2) pemberi solusi akan perubahan yang terjadi dan Berkontribusi terhadap kemajuan

sekolah, dan 3) pemberi bantuan guna menyukseskan kegiatan kemitraan yang berlangsung.

Kemampuan kepala sekolah dalam mengenali elemen perubahan DUDIKA yang Berkontribusi terhadap kualitas lulusan sangat diperlukan bagi kepemimpinan kepala sekolah khususnya SMK. Kepala sekolah harus terbuka dan mampu meningkatkan pengetahuan serta keterampilan agar mampu mengelola perubahan DUDIKA yang terus berubah (Murwanti, 2017), yang mana dalam kebijakan merdeka belajar kepala sekolah sebagai penggerak perubahan di sekolah. Atas dasar tersebut, kepala sekolah harus membuat program kerja melalui kegiatan yang ada di SMK yang mampu menyediakan kesempatan dan juga tantangan guna mengembangkan pengetahuan, kemandirian, kebutuhan, kepribadian, kapasitas, dan juga kreativitas dengan dinamika dan kenyataan lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut Mendikbud (2020) bahwa kepala sekolah dituntut untuk menjadi seperti *Chief Executive Officer* (CEO) perusahaan, yang mana harus mampu mengatur sekolah guna mencari dan mengembangkan kesempatan peluang kemitraan dengan DUDIKA. selain itu, kepala sekolah juga harus memiliki keinginan dalam berlatih dan meningkatkan kompetensi keahliannya guna terus relevan dengan keahlian yang menjadi standarisasi kualifikasi DUDIKA. Atas dasar itulah, menjadi suatu kepentingan dan keharusan kepala sekolah yang adaptif akan perubahan DUDIKA yang terus berkembang pada kemajuan (Jannah, 2020). Keharusan ini sebagai upaya agar SMK mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan beradaptasi di masyarakat dan mandiri (Supriatna, 2018). Dari data studi pendahuluan lainnya bahwa dalam

praktiknya belum optimalnya kesiapan dan kompetensi keahlian yang dimiliki oleh kepala sekolah yang mendukung dan memiliki keberanian penuh guna melakukan suatu terobosan baru untuk menciptakan inovasi bagi kemajuan sekolah.

Dengan peran kepemimpinan kepala sekolah dalam melaksanakan hubungan kemitraan yang baik dengan proses pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan peserta didik, sejalan dengan konsep kebijakan merdeka belajar yang mana peserta didik sebagai calon tenaga kerja memiliki peluang guna mengembangkan dan menyalurkan *passionnya* melalui proses pembelajaran yang didapatkan di sekolah dengan adanya pembelajaran yang berbasis industri atau mendapatkan pengalaman di luar sekolah (Yamin & Syarir, 2019). Keselarasan dan keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tantangan SMK dalam mencetak lulusan tepat terhadap tuntutan dari DUDIKA. Sehingga pendidikan di SMK semakin mumpuni, mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang berdaya saing dan menjadi kekuatan tersendiri bagi sekolah.

Aspek yang wajib mendapatkan perhatian sebagai usaha untuk meningkatkan mutu proses dan juga penilaian pembelajaran untuk SMK ialah faktor yang mendorong dalam melaksanakan penyelaras kompetensi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan juga kemitraan dengan pihak DUDIKA.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa sekolah diharuskan mampu menjalin hubungan yang baik dengan DUDIKA yang berawal dari proses merencanakan program yang dapat meningkatkan kualitas sampai dengan penerapan evaluasi program. Tanpa terjalinnya hubungan yang baik dengan DUDIKA, maka sekolah akan menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan pengelolaan pendidikan

yang berkualitas. Kemitraan yang terjalin dengan DUDIKA mampu mengoptimalkan penyediaan lulusan SDM dan pemenuhan fasilitas yang mendukung sesuai dengan konsep merdeka belajar. Kemitraan ini memiliki dampak yang baik untuk kedua belah pihak yaitu sekolah dan DUDIKA, serta proses dari pelaksanaan pembelajaran menjadi relevan terhadap tantangan dan juga tuntutan DUDIKA yang berlangsung dengan baik, serta menjadikan lulusan lebih kompeten (Azizah, Murniati & Khairuddin, 2015).

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas selanjutnya identifikasi masalah terkait manajemen kepemimpinan kepala sekolah SMK berbasis dunia industri dan dunia kerja dalam kebijakan kurikulum dapat meliputi :

- 1) Terjadinya kesenjangan antara apa yang diajarkan di sekolah dengan apa yang dibutuhkan oleh industri, sehingga lulusan tidak sepenuhnya siap menghadapi tantangan di lapangan.
- 2) Ketidakterlibatan dunia industri dan dunia kerja dalam pengembangan kurikulum di SMK.
- 3) Ketidakhahaman kepala sekolah tentang dunia industri dan dunia kerja sehingga tidak mampu mengarahkan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan.
- 4) Guru-guru SMK tidak mengajar sesuai dengan bidang keahliannya dan belum berpengalaman dalam dunia industri dan dunia kerja.
- 5) Ketidakmemadaiannya sarana prasarana SMK yang *link and match* dengan dunia industri dan dunia kerja

- 6) Evaluasi kinerja siswa hanya dilakukan oleh guru tanpa melibatkan dunia kerja dan dunia industri.
- 7) Sekolah belum menerapkan peraturan terkait pengajar dari dunia usaha dan dunia industri.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, masalah penelitian ini dibatasi pada proses pengelolaan manajemen kepemimpinan sekolah berbasis DUDIKA dalam upaya mendukung kebijakan kurikulum merdeka di Kabupaten Bangli. Penelitian ini difokuskan dalam penyelarasan kompetensi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan juga kemitraan dengan pihak DUDIKA.

1.4 Rumusan Masalah

Uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas menjadi dasar bagi peneliti untuk merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah deskripsi kuantitatif kepemimpinan transformasional, kepemimpinan strategis, kepemimpinan visioner dan Kinerja guru produktif secara univariat?
2. Apakah kepemimpinan transformasional berkontribusi positif dan signifikan terhadap kinerja guru produktif SMK Negeri di Kabupaten Bangli?
3. Apakah kepemimpinan strategis berkontribusi positif dan signifikan terhadap kinerja guru produktif SMK Negeri di Kabupaten Bangli?

4. Apakah kepemimpinan visioner berkontribusi positif dan signifikan terhadap kinerja guru produktif SMK Negeri di Kabupaten Bangli?
5. Apakah kepemimpinan transformasional, kepemimpinan strategis dan kepemimpinan visioner secara simultan berkontribusi positif dan signifikan terhadap kinerja guru produktif SMK Negeri di Kabupaten Bangli?
6. Bagaimanakah temuan kualitatif kepemimpinan transformasional, kepemimpinan strategis dan kepemimpinan visioner yang paling berkontribusi terhadap kinerja guru produktif dalam implementasi kurikulum merdeka belajar berbasis DUDIKA di SMK Negeri Kabupaten Bangli?

1.5 Tujuan Penelitian

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang berhubungan dengan formulasi permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan secara kuantitatif kepemimpinan transformasional, kepemimpinan strategis, kepemimpinan visioner dan Kinerja guru produktif secara univariat.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan Kontribusi positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja guru produktif SMK Negeri di Kabupaten Bangli.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan Kontribusi positif dan signifikan kepemimpinan strategis terhadap kinerja guru produktif SMK Negeri di Kabupaten Bangli.

4. Untuk menganalisis dan menjelaskan Kontribusi positif dan signifikan kepemimpinan visioner terhadap kinerja guru produktif SMK Negeri di Kabupaten Bangli.
5. Untuk menganalisis dan menjelaskan Kontribusi positif dan signifikan secara simultan kepemimpinan transformasional, kepemimpinan strategis dan kepemimpinan visioner terhadap kinerja guru produktif SMK Negeri di Kabupaten Bangli.
6. Untuk mengetahui temuan kualitatif kepemimpinan transformasional, kepemimpinan strategis dan kepemimpinan visioner yang paling berkontribusi terhadap kinerja guru produktif dalam implementasi kurikulum merdeka belajar berbasis DUDIKA di SMK Negeri Kabupaten Bangli

1.6 Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan secara teoretis maupun secara praktis.

a. Signifikansi Teoritis Penelitian

1) Relevansi Kurikulum

Penelitian ini akan membantu memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan di SMK memiliki relevansi yang tinggi dengan dunia kerja saat ini. Dengan memahami tren dan kebutuhan industri, kepala sekolah dapat mengarahkan pengembangan kurikulum untuk mencakup keterampilan dan kompetensi yang paling dibutuhkan oleh siswa.

2) Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMK dengan memastikan bahwa kurikulum yang disusun sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja. Hal ini akan membantu mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk memasuki pasar kerja.

b. Signifikansi Praktis Penelitian

1) Keterlibatan stakeholder industri

Penelitian ini dapat memperkuat hubungan antara SMK dengan dunia industri dan kerja dengan melibatkan pemangku kepentingan industri dalam proses pengembangan kurikulum, sekolah dapat memastikan bahwa siswa mendapatkan pengalaman praktis dan pengetahuan yang relevan dengan dunia kerja.

2) Peningkatan efektivitas kepemimpinan kepala sekolah

Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang praktik kepemimpinan yang efektif dalam konteks pengembangan kurikulum berbasis industri. Hal ini dapat membantu kepala sekolah dalam mengoptimalkan peran dan fungsi mereka dalam memimpin sekolah menuju pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik.

3) Peningkatan Kompetensi Guru

Melalui penelitian ini, akan diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru-guru SMK. Hal ini akan membantu meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar materi yang berorientasi pada dunia industri dan kerja.

4) Kontribusi terhadap Kebijakan Pendidikan

Temuan dari penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan pendidikan dalam merancang regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan kurikulum berbasis industri di SMK.

Dengan demikian, penelitian tentang manajemen kepemimpinan kepala sekolah SMK berbasis dunia industri dan dunia kerja dalam kebijakan kurikulum memiliki signifikansi yang besar dalam meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan di tingkat SMK serta mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks.

1.7 Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini diperoleh beberapa istilah menjadi acuan serta rujukan diketahui sebagai berikut

1) Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah

Ini mengacu pada kemampuan kepala sekolah untuk mengelola dan memimpin sekolah dengan efektif. Ini termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, dan program-program pendidikan. Manajemen kepemimpinan ini penting dalam menentukan arah dan kesuksesan sekolah, termasuk implementasi kebijakan kurikulum.

2) SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

Lembaga pendidikan menengah yang memberikan pendidikan kejuruan dan keterampilan kepada siswa. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan siswa untuk langsung memasuki dunia kerja setelah lulus atau untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi yang berhubungan dengan bidang kejuruan.

3) Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja

Merujuk pada lingkungan dan aktivitas di sektor industri dan pasar kerja. Ini termasuk perusahaan, organisasi bisnis, dan entitas lainnya di berbagai sektor ekonomi. Kebijakan kurikulum yang berbasis dunia industri dan dunia kerja berfokus pada mempersiapkan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk memasuki dan berhasil dalam pasar kerja.

4) Merdeka Belajar

Mengacu pada seperangkat keputusan dan pedoman yang mengatur pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum di lembaga pendidikan. Kebijakan kurikulum menentukan tujuan pembelajaran, struktur program, konten materi, dan metode evaluasi, yang harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan tuntutan dari dunia industri dan kerja.

1.8 Novelty/Kebaharuan Penelitian

Kebaharuan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan penelitian dengan metode penelitian campuran (*mixed method*) dengan pendekatan *explanatory research*. Metode penelitian eksplanatori (*explanatory research*) ini dapat menganalisis kontribusi secara kuantitatif variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian hasil temuan kuantitatif, selanjutnya dilakukan pendalaman tentang makna kualitatif temuan penelitian kuantitatif tersebut melalui konfirmasi untuk meyakini keabsahan temuan penelitian tersebut.

Kebaharuan temuan penelitian ini bahwa kepemimpinan strategis kepala sekolah berbasis DUDIKA memiliki kontribusi paling kuat terhadap kinerja guru produktif. Dapat dijelaskan bahwa temuan hasil penelitian kuantitatif

kepemimpinan strategis berbasis DUDIKA dalam implementasi kebijakan merdeka belajar berkontribusi positif dan signifikan terhadap kinerja guru produktif dalam implementasi merdeka belajar di SMK Negeri kabupaten Bangli.

